

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan yang sistem kepemilikannya terdiri dari banyak pemegang saham atau sudah menjadi perusahaan publik membutuhkan pimpinan perusahaan yang mampu mengelola perusahaan dengan baik dan mampu mengakomodir kepentingan dari para pemegang saham sebagai pihak yang menyertakan modal di perusahaan. Dengan diterapkannya pemisahan peran antara kepemilikan dan pelaksana jalannya perusahaan memunculkan sebuah masalah baru yang disebut masalah keagenan yang dalam teori disebut sebagai *Agency Theory*, dimana pihak yang disebut agen yang merupakan jajaran manajemen perusahaan melakukan kebijakan dan langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan perusahaan yang hanya mementingkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri dan golongannya tanpa memerhatikan kepentingan dari pemegang saham dalam hal ini disebut sebagai prinsipal yang merupakan pemilik dari perusahaan (Panda dan Leepsa, 2017).

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kaitannya dengan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan pimpinan perusahaan adalah dalam hal pelaksanaan kebijakan dividen. Dividen adalah laba yang didapatkan oleh pemegang saham dalam suatu perusahaan sebagai imbal balik dari penyertaan modal yang disertakan oleh investor dalam bentuk kepemilikan saham.

Dari sisi perusahaan, memutuskan kebijakan dividen yang tepat merupakan suatu hal yang krusial dikarenakan kemampuan perusahaan dalam membiayai investasi yang akan dilakukan di masa depan juga dipengaruhi oleh besaran jumlah dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham (Oyinlola dan Ajeigbe, 2014). Untuk mengatasi terjadinya permasalahan yang diakibatkan perbedaan kepentingan diantara pimpinan perusahaan dan pemegang saham, dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat mengendalikan dan memastikan setiap pihak menjalankan hak dan kewajibannya yang kemudian disebut sebagai tata kelola perusahaan.

Dalam kaitannya antara tata kelola perusahaan dengan kebijakan dividen, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2013) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang buruk cenderung membayar dividen yang lebih tinggi dikarenakan untuk menutupi keburukan dari tata kelola perusahaan dengan menunjukkan citra yang baik kepada pemegang saham dengan membayarkan dividen. Sementara menurut penelitian yang dilakukan oleh Brown (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tata kelola dewan pimpinan perusahaan yang baik cenderung membayar dividen lebih tinggi kepada para pemegang saham. Perusahaan yang melaksanakan praktik tata kelola perusahaan yang baik memiliki dampak dalam transparansi dari kegiatan operasional perusahaan, meningkatkan tingkat profitabilitas, dan dapat menghasilkan sumber pendapatan lain bagi pemegang saham dalam bentuk pembagian dividen (Adebayo *et al.*, 2014).

Dalam mewujudkan praktik tata kelola perusahaan yang baik, didalamnya terdiri dari beberapa komponen yang diprediksi memiliki efek yang signifikan

terhadap kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi investor sehingga menarik untuk diteliti, yang diantaranya adalah: *Board Size*, *Board Independence*, *Board Meeting*, dan *Board Gender*. Dewan komisaris memiliki peran untuk mengawasi jalannya aktivitas perusahaan serta memastikan setiap langkah yang diambil oleh pihak manajemen dalam menentukan strategi perusahaan sejalan dengan para pihak pemegang kepentingan dari perusahaan. Ukuran dewan komisaris yang besar dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dikarenakan dapat menghasilkan saran dan himbauan yang berkualitas terhadap manajemen perusahaan (Nguyen *et al.*, 2016). Dengan semakin besarnya komposisi dari ukuran dewan komisaris memungkinkan terjadinya penurunan risiko dalam pengambilan keputusan-keputusan penting dalam perusahaan seperti keputusan investasi, hutang, dan pengelolaan pendapatan (Huang dan Wang, 2015).

Pada kaitannya dalam memengaruhi kebijakan dividen, penelitian yang dilakukan oleh Elmagrhi (2017), Al-Najjar (2016), dan Gill (2012) menunjukkan bahwa *board size* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kebijakan dividen dikarenakan semakin besarnya ukuran dewan perusahaan dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam akan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan yang terbaik untuk mengedepankan kepentingan pemegang saham. sementara Sharif (2015), Shehu (2015), dan Hadamean (2019) menyatakan hal yang sebaliknya dimana perusahaan dengan ukuran dewan komisaris yang lebih rendah cenderung memiliki tingkat pembayaran dividen yang tinggi dan memiliki resiko kebangkrutan lebih kecil dikarenakan terjadinya

kemudahan untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan keputusan diantara para anggota dewan yang tidak berukuran terlalu besar.

Karakteristik tata kelola perusahaan selanjutnya adalah independensi dewan atau *board independence*. *Board independence* adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari pihak luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan bisnis maupun pribadi terhadap pihak manajemen dan setiap pihak pemegang kepentingan di perusahaan (Knyazeva *et al.*, 2013). Hadirnya anggota dewan komisaris yang bersifat independen dipandang penting untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang akan terjadi dalam jajaran pimpinan perusahaan sehingga kinerja perusahaan menjadi tidak maksimal.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Prasanna (2014), Yarram (2015), dan Setiyowati (2017) menyatakan bahwa *board independence* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal tersebut dikarenakan dewan independen memiliki peran penting dalam meminimalisir pengambilan hak pemegang saham minoritas melalui tingkat pembayaran dividen yang rendah dikarenakan para dewan tersebut tidak memiliki kepentingan tertentu di perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih objektif. Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Sener (2019), Benjamin (2015), dan Nuhu (2014) menyatakan *board independence* memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Hal tersebut didasari oleh teori substitusi dimana pembayaran dividen dilakukan dengan motif untuk menutupi kelemahan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, dalam hal ini minimnya dewan independen yang dapat mengedepankan kepentingan pemegang saham.

Kinerja dewan komisaris dapat dilihat melalui komunikasi yang mereka lakukan dalam melakukan pengawasan, salah satunya melalui pertemuan antar dewan pimpinan perusahaan atau yang sering disebut *board meeting*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prasanna (2014), Dewasiri (2019) dan menyatakan bahwa *board meeting* memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen, dimana frekuensi rapat yang tinggi menunjukkan kualitas yang baik dalam penentuan keputusan yang bersifat strategis seperti keputusan pembayaran dividen. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Elmagrhi (2017), Benjamin (2015), dan Mehdi (2017) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa *board meeting* memiliki pengaruh yang negatif terhadap kebijakan dividen, sesuai dengan teori substitusi yang menyatakan bahwa pembayaran dividen berlaku sebagai *agency cost* untuk menutupi tata kelola perusahaan yang buruk.

Keanggotaan dari dewan komisaris sebuah perusahaan dapat memiliki komposisi anggota yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, salah satunya adalah komposisi anggota dewan komisaris perempuan didalam suatu dewan komisaris. Perbedaan gender merupakan salah satu dari beberapa karakteristik keberagaman yang ada didalam keanggotaan dewan komisaris yang dilihat mampu membawa pengaruh dalam kinerja dewan komisaris. Keberagaman ini dapat meningkatkan kemampuan dewan komisaris dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat dikarenakan terdapat perspektif yang berbeda-beda dari tiap anggota dewan sehingga banyak alternatif-alternatif pilihan yang tercipta (Gordini dan Racanti, 2017). Salah satu organisasi yang berafiliasi dengan Bank Dunia yaitu International Finance Corporation (IFC)

menyatakan pada tahun 2017 Indonesia menempati urutan ketiga dalam ukuran negara dengan keberagaman gender dalam jajaran eksekutif perusahaan di Asia Tenggara yaitu sebesar 14,9 persen sementara posisi pertama diduduki oleh Thailand sebesar 20,4 persen dan posisi kedua yaitu Vietnam dengan 15,4 persen.

Dalam hubungannya dengan kebijakan dividen, menurut Ye (2019), Chen (2017), dan Martínez (2016) menyatakan *board gender* memiliki pengaruh yang positif terhadap pembayaran dividen dikarenakan hadirnya diversifikasi gender dapat menghasilkan keputusan yang terbaik yang dihasilkan dari hadirnya berbagai perspektif dalam mengatasi masalah keagenan dan kepentingan pemegang saham. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Elmagrhi (2017), Saeed (2017), dan Tahir (2020b) menunjukkan bahwa *board gender* memiliki pengaruh yang negatif terhadap kebijakan dividen. Pembayaran dividen berlaku sebagai kompensasi atas tata kelola perusahaan yang buruk berdasarkan teori substitusi.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan diatas, teori umum yang dominan dalam menjelaskan pengaruh tata kelola perusahaan adalah teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen (1976) yang menyatakan terdapat hubungan dimana pihak yang berlaku sebagai prinsipal atau pemegang saham perusahaan memberikan kewenangan kepada pihak yang disebut agen atau dewan pimpinan perusahaan termasuk dewan komisaris untuk menjalankan perusahaan, namun terdapat masalah dimana pihak agen memiliki kemungkinan untuk tidak selalu mengedepankan kepentingan pemegang saham sehingga dapat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh dewan pimpinan perusahaan termasuk kebijakan dividen. Sementara turunan dari teori agensi tersebut adalah

teori substitusi dan teori *outcome* yang dikemukakan oleh La Porta (2000) yang menyatakan pada model substitusi menyatakan pada perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang buruk dan perlindungan investor yang lemah cenderung untuk melakukan pembayaran dividen dalam rangka untuk membangun citra yang baik bagi perusahaan dimata investor dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan arus pendanaan dari investor pihak luar. Sementara pada model *outcome* menyatakan perusahaan yang cenderung membayarkan dividen sebagai hasil dari tata kelola perusahaan yang serta menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengedepankan perlindungan pemegang saham

Penelitian yang melibatkan aspek-aspek tata kelola perusahaan terutama dalam hal ini karakteristik dewan komisaris dikarenakan Indonesia menganut dua sistem pemisahan pimpinan perusahaan antara dewan direksi dan komisaris sehingga dewan komisaris dilihat memiliki peran yang penting dalam mengawasi kebijakan dan langkah yang dilakukan oleh dewan direksi seperti yang telah dijelaskan diatas menjadi pembahasan yang menarik untuk diteliti namun masih terjadi inkonsistensi dari literatur-literatur sebelumnya sehingga penulis tertarik untuk memilih judul “*Pengaruh Ukuran Dewan, Komisaris Independen, Rapat Dewan, dan Diversitas Gender Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Non-Finansial Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2018*” untuk mengetahui lebih jelas bagaimana komponen-komponen didalam tata kelola perusahaan dalam memengaruhi kebijakan dividen perusahaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dinyatakan rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018?
2. Apakah komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018?
3. Apakah frekuensi rapat dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018?
4. Apakah diversitas gender dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018
2. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018

3. Untuk mengetahui pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018
4. Untuk mengetahui pengaruh diversitas gender dewan komisaris terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kontribusi terhadap pemahaman pada bidang manajemen keuangan, serta berkontribusi terhadap penambahan referensi baru tentang bukti empiris dari pengaruh komponen-komponen yang ada didalam tata kelola perusahaan dalam hal ini yang dimaksud adalah ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, rapat dewan komisaris, serta diversitas gender dewan komisaris terhadap kebijakan dividen pada perusahaan-perusahaan non finansial di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini dapat mendatangkan informasi yang berguna bagi perusahaan dalam rangka mengevaluasi bagaimana pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam hal ini yang berkaitan dengan ukuran

dewan komisaris, dewan komisaris independen, rapat dewan komisaris, serta diversitas gender dewan komisaris yang telah dijalankan dan sebagai acuan dalam membangun sistem tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka membuat keputusan-keputusan yang terkait dengan operasional perusahaan dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan di perusahaan khususnya dalam kebijakan dividen.

b. Bagi Investor atau Calon Investor

Penelitian ini menyajikan informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melihat bagaimana komponen-komponen dari tata kelola perusahaan yaitu ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, rapat dewan komisaris, serta diversitas gender dewan komisaris berdampak terhadap kebijakan dividen yang dibuat oleh perusahaan sebelum melakukan kegiatan investasi.